

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan tanggungjawab mutlak (*Strict Liability*) yang tertuang dalam akta perdamaian tentang pemulihan ekosistem gambut sebagai ganti rugi nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN serta akibat hukum tidak terlaksananya isi perjanjian perdamaian dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada lahan korporasi Pt. Pesona Belantara Persada dan Pt. Putra Duta Indah Wood. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah Yuridis-Empiris, dimana pengumpulan data dan pengolahan data dilakukan secara empiris-normatif dari data secara faktual berdasarkan kasus yang terjadi dan menganalisis kasus berdasarkan undang-undang dan norma yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, keterlambatan pelaksanaan putusan atau akta perdamaian yang telah disahkan, pengadilan dapat memerintahkan pembayaran uang paksa untuk setiap hari keterlambatan. Pihak yang telah sengaja lalai dan melakukan wanprestasi tanpa adanya *overmacht* atau *force majeure*, memiliki akibat hukum yang dapat dikenakan sanksi yang berupa membayar kerugian yang diderita pihak lainnya, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila di gugat ke pengadilan.

Kata Kunci : Akta Perdamaian, Ganti Rugi, Akibat Hukum, Kebakaran Hutan.

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze how the application of absolute responsibility (Strict Liability) contained in the peace deed regarding the restoration of peat ecosystems as compensation number 44/Pdt.G/LH/2021/PN and the legal consequences of non-implementation of the content of the peace agreement in the case of forest and land fires that occurred on the corporate land of Pt. Pesona Belantara Persada and Pt. Putra Duta Indah Wood. The peeling method used in this thesis is Juridical-Empirical, where data collection and data processing are carried out empirically-normatively from factual data based on cases that occur and analyze cases based on applicable laws and norms. Based on the results of the research, the delay in the implementation of the verdict or peace deed that has been passed, the court can order the payment of forced money for each day of delay. Parties who have deliberately negligent and committed a default without an overmacht or force majeure, have legal consequences that can be sanctioned in the form of paying losses suffered by other parties, cancellation of agreements, transfer of risks, and paying case costs if sued in court.

Keywords: Peace Act, Compensation, Legal Consequences, Forest Fires.